

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan unsur mendasar dan penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui pendidikan, setiap orang dapat menjadi pribadi yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan negara lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan gambaran awal Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan khusus untuk menaikkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan umum rakyatnya. Pasal 28 Konvensi Hak Anak tahun 1990 menyatakan bahwa Negara harus menjamin dan memelihara kebebasan pendidikan anak-anak dengan menetapkan kebijakan pendidikan dasar lokal yang bebas dan wajib. Untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, negara berkewajiban memberikan kesempatan pendidikan yang memadai kepada seluruh warga negara. Pembangunan pendidikan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangatlah penting karena memegang peranan penting dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Roheni dan Saryono, 2018).

Kemiskinan adalah salah satu penghalang pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia, di mana komponen ekonomi keluarga mempengaruhi pendidikan anak (Maharani *et al.*, 2024). Kemiskinan adalah akar masalah di Indonesia. Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah menjadi

ciri yang membedakan antara kota dan pedesaan di Indonesia (Watif *et al.*, 2024). Angka kemiskinan dan anak putus sekolah di Indonesia masih menjadi perhatian. Pada tahun 2024, sekitar 76% keluarga mengakui bahwa alasan anak mereka putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Lebih rinci, 67% dari mereka tidak mampu membiayai sekolah, sementara 8.7% harus bekerja untuk membantu keluarga (wonosobokab.bps.go.id, 2020-2022).

Sementara itu, Angka kemiskinan dan anak putus sekolah di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 hingga 2021 makin tinggi. Data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2021 menyebut, sebanyak 3.581 anak di Wonosobo putus sekolah yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan. Untuk itu perlunya dilakukan bentuk pendampingan dari Perangkat Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi dengan melihat seluk beluk permasalahan dasarnya dahulu. Pedesaan khususnya di Kabupaten Wonosobo dari 25 desa yang angka kemiskinannya tinggi kita akan menganalisa lebih jauh mengingat alokasi anggaran untuk desa tersebut dinilai cukup tinggi tapi tidak sebanding dengan kemajuan sektor lintas ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan warganya, ini bentuk evaluasi bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat,” tuturnya saat memberikan sambutan pengarahan acara Rapat Koordinasi (Rakor) camat se-Wonosobo Jumat, (11/02), di Ruang Mangunkusomo Sekretariat Daerah (diskominfo.wonosobokab.go.id).

Kondisi partisipasi sekolah yang bervariasi di setiap kelompok usia ini tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, terutama tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di beberapa daerah berkontribusi

terhadap rendahnya partisipasi sekolah di Kabupaten Wonosobo. Berikut tabel angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2020-2022 berdasarkan jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa).

Tabel 1.1
Kemiskinan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020–2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
2020	137,64	17,36%
2021	139,67	17,67%
2022	128,11	16,17%

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo*

Berdasarkan data dalam tabel, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 137,64 ribu jiwa berada dalam kategori miskin. Jumlah ini meningkat menjadi 139,67 ribu jiwa pada tahun 2021, yang menunjukkan adanya tekanan ekonomi, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan kuat pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan jumlah penduduk miskin menjadi 128,11 ribu jiwa. Penurunan ini dapat mencerminkan mulai pulihnya kondisi ekonomi masyarakat serta efektivitas berbagai program bantuan sosial dan

pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Meskipun demikian, angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat, terutama di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, agar hasilnya lebih merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, data Susenas yang diolah Bappenas tahun 2022 menunjukkan bahwa 4.087.288 anak usia sekolah (7-18 tahun) tidak pergi ke sekolah, naik 4.444 dari 3.939.869 anak pada tahun 2021 (Simbolon *et al.*, 2024). Ini berarti bahwa pemerintah harus melaksanakan hak seluruh warga negara atas layanan pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Dengan kata lain, pemerintah harus bertanggung jawab atas pendidikan warga negara. Untuk menjalani kehidupan yang bijak dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, setiap negara bertanggung jawab. Pendidikan adalah hak setiap orang di Indonesia. Namun, karena beberapa orang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, pemerintah masih belum mencapai tujuan wajib belajar.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan perancangan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk uang tunai, akses dan perluasan kesempatan belajar bagi siswa dari keluarga miskin untuk menutupi biaya pendidikan swasta. Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu jenis kartu tanda pengenal yang didukung oleh Program Indonesia Pintar (PIP) (Andena *et al.*, 2024). Adanya program Kartu Indonesia Pintar memungkinkan anak usia 6 hingga 21 tahun dapat mengakses lembaga

pendidikan dan menyelesaikan pendidikan tinggi tambahan, mendukung terselenggaranya pendidikan komprehensif, termasuk wajib belajar 12 tahun, memberikan akses pendidikan bagi siswa. Institusi pendidikan melindungi mereka dari kemungkinan putus sekolah. Siswa yang belum menyelesaikan pendidikan berhak untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan, karena kehidupan sehari-hari mereka saat melanjutkan studi mungkin akan terkena dampak KIP karena kesulitan keuangan (Simbolon dkk, 2024).

Pemerintah Indonesia membentuk bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memberikan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera. Lebih lanjut, Peraturan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Ketentuan Khusus PIP-KIP Tahun 2024 menyebutkan bahwa tujuan program Indonesia pintar (PIP) adalah untuk membuat perbedaan siswa dari keluarga kurang mampu atau mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka dan pendidikan tambahan. Siswa yang memiliki KIP dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sasaran PIP. Penyaluran dana melalui rekening bank peserta didik atau metode lain yang ditentukan serta pengecekan penerima berdasarkan data yang divalidasi dan diverifikasi. penggunaan dana PIP untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti perlengkapan sekolah, transportasi, biaya praktik, ujian kompetensi, dan biaya tambahan. Sekolah harus melaporkan bagaimana dana digunakan, sedangkan pemerintah memastikan bahwa dana digunakan dengan benar.

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai bagian dari pemerintah berupaya untuk memajukan akses dan kualitas pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Data terkini yakni jumlah penerima manfaat PIP di Wonosobo mengalami fluktuasi pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Data rinci penerima PIP di Kabupaten Wonosobo berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 1.2
Data Penerima PIP Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Data PIP
Kemendikbud

Jenjang	Jumlah Siswa Penerima PIP		Kenaikan (%)	Jumlah Siswa Penerima PIP	Kenaikan (%)
	2021	2022		2023	
SD	33.853	39.901	17,87	41.363	3,66
SMP	12.623	15.676	24,19	15.891	1,37
Jumlah	46.476	55.577	19,58	57.254	3,02

Sumber Data: <https://pip.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan **Tabel 1.2** yang memuat data dari laman resmi Program Indonesia Pintar (<https://pip.kemdikbud.go.id/>), jumlah penerima manfaat PIP di Kabupaten Wonosobo mengalami tren fluktuatif selama periode tahun 2021 hingga 2023. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), tercatat sebanyak 33.853 siswa menjadi penerima PIP pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat menjadi 39.901 siswa di tahun 2022 dengan persentase kenaikan sebesar 17,87%. Kemudian pada tahun 2023, jumlahnya kembali bertambah menjadi 41.363 siswa, meskipun laju kenaikannya menurun menjadi 3,66%. Di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), penerima PIP pada tahun 2021 berjumlah 12.623 siswa. Jumlah ini meningkat menjadi 15.676 siswa di tahun 2022 atau naik

sebesar 24,19%. Namun, pada tahun 2023, kenaikan jumlah penerima hanya sebesar 1,37% dengan total 15.891 siswa. Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah total penerima PIP dari jenjang SD dan SMP pada tahun 2021 adalah 46.476 siswa, kemudian naik menjadi 55.577 siswa pada tahun 2022 (kenaikan 19,58%), dan mencapai 57.254 siswa di tahun 2023 dengan kenaikan yang lebih rendah yaitu 3,02%. **Tabel 1.2** ini memperlihatkan bahwa walaupun jumlah penerima terus meningkat dari tahun ke tahun, namun persentase kenaikannya cenderung melambat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa cakupan sasaran program telah mulai mencapai titik maksimal, atau terdapat dinamika kebijakan dan administratif yang memengaruhi distribusi bantuan.

Sementara itu, data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2021-2023 menunjukkan jumlah penerima Program PIP di Kabupaten Wonosobo sebagai berikut.

Tabel 1.3
Data Penerima PIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo

Jenjang	Jumlah Siswa Penerima PIP		Kenaikan (%)	Jumlah Siswa Penerima PIP	Kenaikan (%)
	2021	2022		2023	
SD	33.777	39.846	17,97	41.363	3,81
SMP	12.430	15.565	25,22	15.891	2,09
Jumlah	46.207	55.411	19,92	57.254	3,33

Sumber Data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Wonosobo

Berdasarkan data yang disajikan pada **Tabel 1.2**, jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), jumlah penerima PIP pada tahun 2021 tercatat sebanyak 33.777 siswa. Angka ini meningkat menjadi 39.846 siswa pada tahun 2022, dengan persentase kenaikan sebesar 17,97%. Kemudian pada tahun 2023, penerima PIP pada jenjang SD kembali mengalami kenaikan menjadi 41.363 siswa, meskipun persentase kenaikannya menurun menjadi 3,81%. Hal serupa terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana penerima PIP pada tahun 2021 berjumlah 12.430 siswa, meningkat menjadi 15.565 siswa di tahun berikutnya atau naik sebesar 25,22%. Namun, pada tahun 2023, jumlahnya hanya naik menjadi 15.891 siswa, dengan kenaikan relatif kecil yakni 2,09%. Jika diakumulasi secara keseluruhan, jumlah penerima PIP dari kedua jenjang tersebut tercatat sebanyak 46.207 siswa pada tahun 2021, naik menjadi 55.411 siswa pada 2022 (kenaikan 19,92%), dan mencapai 57.254 siswa pada 2023 dengan kenaikan sebesar 3,33%. Data dalam **Tabel 1.3** ini menunjukkan bahwa meskipun penerima PIP terus bertambah setiap tahunnya, namun laju pertumbuhannya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi refleksi atas dinamika pelaksanaan kebijakan PIP di daerah, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun aspek administratif dan komunikasi yang mendukung program tersebut.

Terlihat pada tabel keduanya terlihat jumlah penerima PIP dari tahun ke tahun terjadi perbedaan. Implementasi PIP ditemukan permasalahan

diantaranya: (1) terdapat indikasi bahwa sebagian dana PIP digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan sekolah, sehingga siswa tidak menerima dana secara utuh sesuai yang seharusnya. (2) Ketidapahaman dan kemungkinan penyalahgunaan dana PIP disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan siswa mengenai prosedur penyaluran dan penggunaan dana PIP. (3) Proses birokrasi yang panjang dan kurang efisien menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana PIP, sehingga tujuan program untuk membantu siswa tepat waktu tidak tercapai. (4) Dana PIP digunakan oleh beberapa siswa untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan pendidikan, seperti membeli barang konsumtif, akibat kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak terkait. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam menggunakan PIP di Dinas Pendidikan dan Olahraga Wonosobo bekerja sama dengan sekolah, wali murid, dan siswa untuk mencapai tujuan program guna meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Selain itu, tujuan PIP adalah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu mengurangi biaya pendidikan, sehingga mereka dapat terus belajar dan mengurangi risiko putus sekolah. Logis untuk menganggap bahwa partisipasi sekolah dapat meningkat sebagai hasil dari lebih banyak penerima PIP. Berikut tabel dan gambar yang menunjukkan peningkatan Angka Keterlibatan Sekolah (APS) menurut kelompok umur di Kabupaten Wonosobo tahun 2021, 2022, dan 2023.

Tabel 1.4

Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

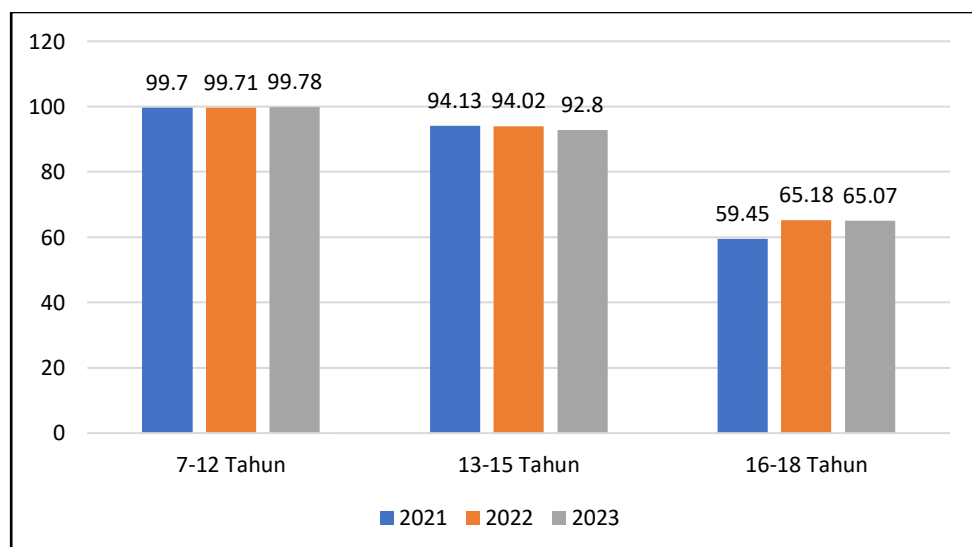
Klasifikasi	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
Tipe Daerah				
Perkotaan	100,00	95,50	54,66	19,51
Pedesaan	99,69	91,59	70,63	12,59
Jenis Kelamin				
Laki-laki	99,55	91,72	72,25	18,78
Perempuan	100,00	93,95	56,14	9,69
Total	99,78	92,80	65,07	14,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berdasarkan data yang disajikan pada **Tabel 1.4**, tingkat partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang cukup mencolok apabila ditinjau dari tipe daerah, jenis kelamin, serta kelompok umur. Pada kelompok umur 7–12 tahun, angka partisipasi sekolah sangat tinggi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, masing-masing sebesar 100,00% dan 99,69%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengakses pendidikan. Namun, tren partisipasi menurun seiring bertambahnya usia. Pada kelompok umur 13–15 tahun, angka partisipasi di wilayah perkotaan mencapai 95,50%, sementara di pedesaan lebih rendah, yaitu 91,59%.

Penurunan semakin tajam terlihat pada kelompok umur 16–18 tahun, dengan angka partisipasi di daerah perkotaan sebesar 54,66% dan pedesaan

70,63%. Bahkan, pada usia 19–23 tahun, partisipasi sekolah turun drastis menjadi hanya 19,51% di wilayah perkotaan dan 12,59% di pedesaan. Jika dilihat dari aspek jenis kelamin, angka partisipasi sekolah untuk anak perempuan usia 7–12 tahun adalah 100,00%, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 99,55%. Namun, tren menurun juga terjadi pada perempuan di usia 19–23 tahun, yang hanya mencapai 9,69%, lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 18,78%. Secara total, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Wonosobo untuk usia 7–12 tahun mencapai 99,78%, sementara pada kelompok usia 13–15 tahun sebesar 92,80%, lalu menurun menjadi 65,07% pada kelompok usia 16–18 tahun, dan hanya 14,53% pada usia 19–23 tahun. **Tabel 1.4** ini menggambarkan bahwa semakin bertambahnya usia, semakin banyak remaja yang tidak lagi melanjutkan pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun akses pendidikan lanjutan yang belum merata.



Gambar 1. 1

**Data Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo**

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa partisipasi sekolah di kelompok umur 7-12 tahun hampir mendekati 100% dan cenderung stabil dari tahun ke tahun, dengan sedikit peningkatan. Anggota umur 13-15 tahun terdapat sedikit penurunan angka partisipasi sekolah di kelompok umur ini selama tiga tahun tersebut. Anggota umur 16-18 tahun jumlah pegawai sekolah di kelompok umur ini lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke 2022, meskipun sedikit menurun pada 2023.

Ketepatan pemberian program Indonesia Pintar belum sepenuhnya sesuai rencana, mengingat masih terdapat beberapa siswa yang tidak memenuhi kriteria namun tetap menerima bantuan tersebut. Kriteria dan tujuan kebijakan belum terpenuhi, dan kebutuhan dukungan belum terpenuhi. Kebijakan harus mencapai dan meningkatkan tujuan sambil membantu siswa yang tidak memiliki kesempatan (Nainah *et al.*, 2023). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Saraswati (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Dasar di Daerah Sungai Pinang Samarinda”. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP belum optimal karena adanya faktor penghambat yakni tidak mengikuti petunjuk pelaksanaan dalam menentukan prioritas penerima, masih belum akuratnya data, terlambatnya pencairan dana, dan rendahnya jumlah dana yang disalurkan. Sosialisasi yang dilakukan tidak optimal, verifikasi KIP memakan waktu lama dan kesadaran orang tua siswa terhadap tugas program Indonesia pintar itu rendah.

Keberhasilan pelaksanaan program Indonesia pintar di Kabupaten Wonosobo memerlukan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, komunikasi aktif antara Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo dengan sekolah penerima manfaat, serta peran aktif orang tua dan masyarakat. Komunikasi yang baik dan efektif antara sekolah, wali murid, dan masyarakat sangat penting dalam implementasi kebijakan program Indonesia pintar di kabupaten Wonosobo. Komunikasi yang baik membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya program Indonesia pintar dan cara melaksanakan program dengan benar. Komunikasi yang jelas dan terbuka juga dapat menghindari kesalahpahaman dan mengatasi potensi konflik yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Komunikasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kebijakan pemerintah.

Komunikasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian kebijakan sehingga harus selalu dilakukan dengan cara yang meminimalkan kesalahan didukung oleh Nainah *et al.*, (2023) . Senada dengan temuan Harta dan Rijali (2023), ditemukan bahwa salah satu variabel yang menopang keberhasilan program Indonesia Pintar adalah komunikasi yang baik antara sekolah, penerima manfaat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lakista (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan pesan yang dilakukan oleh pelaksana program atau orang lain. Dengan demikian, komunikasi dapat menjadi komponen yang sangat penting dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi. Dengan memperhatikan Permendikbud

No. 12 Tahun 2012, maka dapat dijangkau oleh para pemangku kepentingan dan instansi pelaksana untuk memperoleh informasi tersebut.

Sumber daya tidak hanya penting untuk komunikasi tetapi juga untuk pelaksanaan strategi. Salah satu penanda penting dari penggunaan strategi yang berhasil adalah "sumber daya yang mencakup jumlah karyawan yang cukup untuk melaksanakan strategi" (Indah & Hariyanti, 2018). Sesuai dengan UUD No.20 Tahun 2003 membahas Kerangka Penas, sumber daya manusia komponen yang paling pertama dalam suatu kelompok, dibandingkan dengan komponen lain seperti modal, teknologi, dan uang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan mempunyai peran utama dalam penyediaan sumber daya manusia yang mampu memajukan negara. Karena manusia mengendalikan orang lain (Maulyan, 2019).

Implementasi program kebijakan pemerintah memerlukan sumber daya. Sebab, pelaksanaan program politik memerlukan sumber daya yang mumpuni dari bidang politik. Bila pelaksana pengaturan tidak memiliki aset penting untuk menjalankan suatu pendekatan, penggunaan pendekatan cenderung tidak akan mampu, betapa pun hati-hati, jelas, dan stabilnya informasi pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan Subekti dkk. (2017) menemukan bahwa aset sangatlah penting bagi keberhasilan pelaksanaan perencanaan, sebab tanpa aset yang handal, pemanfaatan pendekatan pada hakikatnya akan gagal. oleh hasil Edyanto dkk. (2021), yang menyatakan bahwa sumber daya sangat penting untuk menjalankan program dan kebijakan. Konsistensi, kejelasan, dan keakuratan aturan dan ketentuan, serta data yang diteruskan bergantung pada

seberapa kuat aset yang dapat diakses dalam pengaturan yang dijalankan. Implementasi kebijakan hanya dapat berhasil jika ada sumber daya yang berfungsi sebagai penegak implementasi kebijakan Suparman (2020). Dengan demikian, tujuan program Indonesia pintar dapat dicapai.

Pertimbangan dalam pelaksanaan Instruksi Mendikbud No.10 Tahun 2020 pada PIP sangat penting untuk menentukan kecukupan pendekatan, tingkat kepatuhan, dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pemanfaatannya di tingkat sekolah. Komunikasi bagus antara pemerintah, sekolah, pendidik, peserta didik, dan wali murid sangat penting bagi keberhasilan PIP. Penelitian yang objektif sangat penting untuk mengetahui sejauh mana komunikasi tersebut mempengaruhi pemahaman dan kepentingan para pihak dalam program ini. Selain itu, sumber daya manusia dan instansi paling penting dalam keberhasilan pelaksanaan program Indonesia pintar. Penelitian ilmiah dapat mengidentifikasi apakah sekolah memiliki tenaga administrasi yang kompeten, sistem yang memadai, serta mekanisme yang jelas dalam menyalurkan bantuan program Indonesia pintar. Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi berbasis data yang berguna bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam meningkatkan efektivitas program Indonesia pintar, baik dalam aspek komunikasi, transparansi, maupun efisiensi penyaluran dana untuk membantu pengambil kebijakan memahami tantangan dan peluang dalam implementasi program Indonesia pintar, sehingga program ini dapat mencapai tujuan yang lebih tepat dan berdampak positif pada pendidikan di Kabupaten Wonosobo.

Pertimbangan ini peneliti ingin menganalisis hubungan antara komunikasi dan aset dengan penggunaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang program Indonesia pintar di Kabupaten Wonosobo.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi secara jelas agar arah dan tujuan penelitian menjadi terarah dan terfokus. Dalam konteks ini, permasalahan yang diangkat berkaitan dengan ketepatan sasaran program bantuan pendidikan dan keterkaitannya dengan partisipasi sekolah di berbagai kelompok usia sebagai berikut.

1. Terdapat indikasi bahwa sebagian dana PIP digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan sekolah, sehingga siswa tidak menerima dana secara utuh sesuai yang seharusnya.
2. Ketidakpahaman dan kemungkinan penyalahgunaan dana PIP disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan siswa mengenai prosedur penyaluran dan penggunaan dana PIP.
3. Proses birokrasi yang panjang dan kurang efisien menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana PIP, sehingga tujuan program untuk membantu siswa tepat waktu tidak tercapai.
4. Dana PIP digunakan oleh beberapa siswa untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan pendidikan, seperti membeli barang konsumtif, akibat kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak terkait.

5. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam menggunakan PIP di Dinas Pendidikan dan Olahraga Wonosobo bekerja sama dengan sekolah, wali murid, dan siswa untuk mencapai tujuan program guna meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan bagi siswa kurang mampu.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan data masalah, perincian permasalahannya dilihat di bawah berikut:

1. Bagaimana hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana hubungan antara komunikasi dan sumber daya dengan implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) di Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sasaran tujuan ini, berdasarkan definisi masalah sebelumnya, dilihat di bawah berikut:

1. Menganalisis hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) di Kabupaten Wonosobo.
2. Menganalisis hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) di Kabupaten Wonosobo.

3. Menganalisis hubungan antara komunikasi dan sumber daya dengan implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) di Kabupaten Wonosobo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Penulis dapat menggunakan temuan penelitian untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mereka serta menerapkan apa yang mereka ketahui selama perkuliahan.
2. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo dan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan kebijakan Program Indonesia Pintar di sekolah menengah membantu meningkatkan dan menyesuaikan program.
3. Bagi masyarakat dan siswa, hasil dari pemikiran ini dapat menambah informasi dan pengetahuan ke dalam variabel yang mempengaruhi terselenggaranya program pendidikan; masyarakat dapat mendorong perbaikan sistem pendidikan; dan partisipasi siswa dapat didorong untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang lebih baik.
4. Penelitian ini akan membantu lebih lanjut, termasuk pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap pelaksanaan Permendikbud Th 2020 No.10 Program Indonesia Pintar.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian yang Terdahulu

Penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain dengan format sebagai berikut: disertasi, artikel dan artikel jurnal nasional, atau referensi yang teridentifikasi untuk artikel tersebut. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Subekti <i>et al.</i> (2017)	Menilai bagaimana komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi mempengaruhi seberapa layak bantuan operasional sekolah (BOS) diawasi.	Implementasi Kebijakan, Efektivitas Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah	Kuantitatif	Hasil pemikirannya menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi secara signifikan mempengaruhi seberapa efektif program BOS di Kecamatan Tambak	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan membahas komunikasi dan sumber daya sebagai faktor implementasi kebijakan pendidikan. Sama-sama menggunakan teori implementasi kebijakan.

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
					dilaksanakan. Secara keseluruhan, keempat variabel ini menunjukkan pengaruh yang sangat besar dan positif. Ini berarti bahwa intensitas informasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang digunakan oleh BOS sebanding dengan tingkat keberhasilan implementasinya.	Perbedaan: Penelitian Subekti meneliti BOS di Kecamatan Tambak dengan 4 variabel (komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi), sedangkan penelitian Anda meneliti PIP di Kabupaten Wonosobo dengan 2 variabel utama (komunikasi dan sumber daya).
2.	Khasanah <i>et al</i> (2018)	Penelitian tentang hubungan antara sikap	hubungan antara sikap pelaksana dan sumber	Kuantitatif asosiatif	Hasil pemikiran menunjukkan bahwa sikap	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		pelaksana dan sumber daya terhadap keberhasilan pelaksanaan pendekatan Program Amanah Keluarga (PKH).	daya terhadap keberhasilan pelaksanaan pendekatan Program Amanah Keluarga (PKH)		dan sumber daya memiliki dampak terhadap pemanfaatan skema terbuka. Sikap memiliki dampak penting terhadap pemanfaatan skema PKH, sedangkan sumber daya memiliki dampak yang tidak berdaya dan tidak signifikan.	kuantitatif dan membahas pelaksanaan program bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan melibatkan variabel internal pelaksana. Perbedaan: Penelitian Khasanah meneliti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan variabel sikap dan sumber daya, sementara penelitian Anda fokus pada Program Indonesia

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
						Pintar (PIP) dengan variabel komunikasi dan sumber daya di Kabupaten Wonosobo.
3.	Riswandi (2020)	Perhatikan pengaruh komponen-komponen seperti komunikasi, aset, sikap, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pendekatan integrasi manfaat kesejahteraan konvensional terhadap pengaturan administrasi	administrasi publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Integrasi, Konsep Kesehatan Tradisional,	Kuantitatif asosiatif	Tampaknya komponen komunikasi mempengaruhi produsen pengaturan, baik individu maupun organisasi. Bentuk komunikasi yang berhasil telah membuat perbedaan dalam pendekatan yang diambil produsen terhadap program kerja	Persamaan: Sama-sama meneliti pengaruh komunikasi dan sumber daya/aset dalam implementasi kebijakan publik menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan: Penelitian Riswandi fokus pada kebijakan kesehatan dan kesejahteraan dengan variabel

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		kesejahteraan konvensional.			yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan.	tambahan seperti sikap dan birokrasi, sedangkan penelitian Anda fokus pada kebijakan pendidikan (PIP) dengan dua variabel utama (komunikasi dan sumber daya).
4.	Machieu (2023)	mengetahui bagaimana (komunikasi), sumber daya (sumber daya), dan sikap pelaksana (disposisi atau sikap) berpengaruh terhadap	Komunikasi (komunikasi), sumber daya (sumber daya), dan sikap pelaksana (disposisi atau sikap), kurikulum, dan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam implementasi Kurikulum Muatan Lokal, komunikasi berpengaruh positif dan penting pada pelaksanaan	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap keberhasilan implementasi

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		kinerja organisasi dalam menerapkan kurikulum muatan lokal secara parsial dan bersamaan.	pelaksanaan kurikulum		organisasi. Sumber daya dan perilaku pelaksana juga memiliki dampak positif dan kritis. Secara umum, komunikasi, sumber daya, dan kondisi pikiran pelaksana memiliki dampak penting pada pelaksanaan organisasi.	kebijakan pendidikan. Perbedaan: Machieu menambahkan variabel disposisi (sikap pelaksana) dan fokus pada pelaksanaan kurikulum muatan lokal, sementara penelitian Anda hanya meneliti komunikasi dan sumber daya dalam konteks Program Indonesia Pintar (PIP).
5.	Luinski <i>et al</i> (2021)	Mengetahui seputar komunikasi, kemenangan realisasi	Pengaturan terbuka, pelaksanaan pendekatan terbuka, dan	Kuantitatif	Hasil pemikirannya tampak bahwa komunikasi mempunyai	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		program peningkatan kartu keluarga, dan dampak komunikasi terhadap kemenangan eksekusi.	demonstrasi Edward III untuk pelaksanaan pendekatan terbuka		dampak yang positif dan penting. terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemutakhiran kartu keluarga. Ada hubungan positif yang kuat antara keduanya.	untuk menganalisis hubungan komunikasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Perbedaan: Penelitian Luinski meneliti program administrasi kependudukan dan hanya fokus pada variabel komunikasi, sedangkan penelitian Anda menguji dua variabel (komunikasi dan sumber daya) pada kebijakan

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
						pendidikan (PIP).
6.	Ariyani <i>et al</i> (2014)	Memperjelas bagaimana hasil pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan dipengaruhi oleh komponen-komponen seperti komunikasi, aset, pola pikir pelaksana, dan struktur birokrasi.	Komunikasi, Sumber Daya, Pandangan Pelaksana, Struktur Birokrasi, Penggunaan Program Peningkatan	Kuantitatif	Timbulnya pertimbangan tersebut tampak bahwa kondisi mental pelaksana, struktur birokrasi, sumber daya, dan komunikasi mempunyai pengaruh positif dan kritis terhadap hasil pemanfaatan program peningkatan kawasan agropolitan.	Persamaan: Sama-sama membahas pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Perbedaan: Penelitian Ariyani fokus pada sektor ekonomi (agropolitan), dengan objek pelaksana wilayah pengembangan; sedangkan penelitian saya fokus pada

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
						pelaksanaan kebijakan pendidikan di instansi pemerintah daerah.
7.	Fitri Mulyani, <i>et al</i> (2023)	Menganalisis efektivitas implementasi Program Indonesia Pintar terhadap partisipasi sekolah di Kawasan Barat dan Timur Indonesia menggunakan data Susenas 2021.	Teori Pendidikan Inklusif, Teori Ketimpangan Sosial-Ekonomi, dan pendekatan Conditional Cash Transfer (CCT)	Kuantitatif - Regresi Logistik (Binary Logistic Regression)	Program Indonesia Pintar terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi sekolah. Anak yang menerima PIP 15,38 kali lebih mungkin bersekolah di KBI, dan 11,71 kali di KTI dibandingkan yang tidak menerima.	Persamaan: Sama-sama membahas pengaruh dan implementasi Program Indonesia Pintar menggunakan pendekatan kuantitatif. Menunjukkan bahwa PIP berdampak positif terhadap tujuan pendidikan nasional. Perbedaan: Fokus

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
					Variabel lain seperti jenis kelamin, status pernikahan, lokasi tempat tinggal, pengeluaran per kapita, dan bantuan sosial lain juga berpengaruh signifikan.	penelitian ini pada hasil (outcome) berupa partisipasi sekolah berdasarkan data makro (Susenas), sedangkan penelitian Anda fokus pada proses implementasi regulasi dari perspektif pelaksana kebijakan di instansi daerah. Penelitian ini tidak menilai faktor komunikasi dan sumber daya sebagai variabel utama. Objek penelitian

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
						mereka adalah siswa secara statistik nasional; Anda meneliti pegawai pelaksana di Disdikpora Kabupaten Wonosobo.
8.	Emil Liza <i>et al.</i> (2021)	Menilai efektivitas PIP di Kecamatan Sosa berdasarkan tiga aspek (Stake Model)	Countenance Stake	Kuantitatif deskriptif	Efektif pada aspek masukan, kurang pada sasaran & distribusi dana	Persamaan: Sama-sama mengevaluasi pelaksanaan PIP dan menemukan kendala implementasi. P erbedaan: Objek siswa SMA sebagai penerima; penelitian saya fokus pada pelaksana kebijakan dan

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
						faktor komunikasi serta sumber daya.
9.	Suaib <i>et al.</i> (2025)	Mengetahui pengaruh pemanfaatan PIP terhadap hasil belajar siswa di SMK Jenepono	Penelitian ini menggunakan model evaluasi Countenance Stake , yang dikembangkan oleh Robert E. Stake , sebagai dasar teori atau pendekatan evaluasi . Model ini terdiri dari tiga komponen utama:	Kuantitatif asosiatif	Terdapat pengaruh positif signifikan antara PIP dan hasil belajar	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif Perbedaan: Fokus hasil belajar siswa, responden siswa, bukan pegawai

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
			1.Antecedent s (Masukan): Faktor-faktor awal yang memengaruhi kesiapan program, seperti tujuan program, sasaran penerima, syarat, jumlah dana, dan mekanisme pengusulan. 2.Transaction s (Proses): Aktivitas atau pelaksanaan program, termasuk distribusi dan pencairan dana kepada penerima manfaat.			

No.	Peneliti	Tujuan Riset	Dasar Teori	Pendekatan	Analisis Hasil	Persamaan dan Perbedaan
			3.Outcomes (Keluaran): Hasil atau dampak dari program, misalnya pemanfaatan dana dan ketaatan terhadap kewajiban penerima.			
10.	Shalsabila <i>et al.</i> (2025)	Mengevaluasi implementasi PIP di SMKN 1 Pandeglang	Model Countenance Stake (antecedent, transaction, outcome)	Kuantitatif evaluatif	Implementasi PIP dinilai baik (66%) tetapi masih ada kendala pencairan & pengawasan	Persamaan: Fokus pada PIP, evaluasi implementasi, kuantitatif. Perbedaan: Lokasi sekolah, teori Stake, siswa sebagai responden

Dalam menyusun penelitian ini, penulis telah membandingkan dan menganalisis sebelas penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek

maupun tujuan, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). Berdasarkan perbandingan tersebut, ditemukan sejumlah perbedaan mendasar dalam hal pendekatan, objek, variabel, dan fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sejumlah kebaruan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Adapun kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Objek penelitian adalah instansi pelaksana kebijakan** (Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo), bukan siswa atau rumah tangga penerima manfaat seperti pada sebagian besar penelitian terdahulu.
2. **Variabel utama dalam penelitian ini adalah komunikasi dan sumber daya**, dua aspek penting dalam teori implementasi kebijakan publik, yang belum secara spesifik dikaji secara kuantitatif dalam konteks PIP pada tingkat daerah.
3. **Fokus pada proses implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020**, bukan hanya pada outcome (hasil) seperti partisipasi sekolah atau prestasi siswa.
4. Menggunakan **pendekatan kuantitatif asosiatif** untuk mengukur hubungan antar variabel internal organisasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Memberikan kontribusi praktis berupa **rekomendasi untuk peningkatan komunikasi dan pengelolaan sumber daya** dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pendidikan di tingkat daerah.

1.5.2 Administrasi Publik

Terjadi perubahan dan perubahan dalam perkembangan paradigma administrasi publik Denhardt membagi paradigma administrasi publik mulai dari administrasi lama, administrasi baru, administrasi baru, dan pelayanan publik baru (Harizal *et al.*, 2020). Hal ini serupa dengan pendapat Supriyadi (2021) yang menyatakan bahwa pergeseran paradigma (perubahan) administrasi publik dapat diamati dalam empat tahap: (1) Pemerintahan lama (OPA) dikenal sebagai pemerintahan konvensional atau klasik, (2) Pemerintahan Baru (NPA) dikenal sebagai Pemerintahan Baru, (3) Manajemen Publik Baru (NPM) dikenal sebagai Paradigma Pemerintahan Baru, dan (4) Layanan Publik Baru (NPS). Sururi (2017) menyatakan bahwa terdapat tiga paradigma dalam perspektif organisasi terbuka: organisasi terbuka kuno, organisasi terbuka modern, organisasi terbuka yang belum digunakan, dan administrasi terbuka yang belum digunakan..

Organisasi terbuka dalam arti luas dapat merupakan suatu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang merupakan anggota suatu organisasi publik dan bekerja sama secara wajar untuk mencapai tujuan yang terbuka. publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik yang bekerja sama secara rasional untuk merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan memantau kegiatan

masyarakat dan prasarana untuk mewujudkan tujuan publik. Hal ini berarti memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kepentingan masyarakat (Widanti, 2022: 25).

Keterbukaan informasi sebagai partisipasi antar kelompok masyarakat yang terdiri dari pejabat pemerintah, badan pemerintahan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat/LSM, kelompok yang berkepentingan, asosiasi profesi, media massa, dan kelompok masyarakat yang bermartabat lainnya. Keterbukaan informasi diartikan sebagai proses menciptakan dan melaksanakan berbagai pengaturan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan mencapai tujuan pemerintah secara efektif, efisien, dan produktif Kader (2020:48).

Administrasi publik sebagai sekumpulan proses yang dilakukan oleh lembaga publik mengatur sumber daya, merumuskan kebijakan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Administrasi publik mencakup berbagai fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pendapat berbanding terbalik oleh Utami (2023).

Administrasi public untuk melayani umum, Pramesti (2018) menjelaskan berbagai macam tugas administrasi publik. problem administrasi publik memperlihatkan pemerintah sebagai perencana dan pelaksana tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam paradigma lama administrasi publik, para birokrat hanya bertanggung jawab menata

kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Wati dkk. (2023) menyatakan bahwa administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara negara dan rakyat serta meningkatkan tanggung jawab politik untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Selain itu, pemerintah bertujuan untuk membangun sistem praktik administrasi agar kegiatan administrasi dapat dilaksanakan secara efisien, efisien, dan transparan.

Penyediaan pelayanan publik, urusan publik, dan pelayanan publik yang adil adalah tujuan utama administrasi publik. Untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama secara erat. Kerja sama pemerintah-masyarakat dalam pengawasan administratif merupakan taktik penting untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan keterbukaan pemerintah menurut penelitian Wiranti dan Adnan (2023).

Kesimpulan kegiatan hubungan sekelompok orang, antara pemerintah atau otoritas publik, yang mengelola sumber daya, membuat kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan administrasi publik adalah untuk meningkatkan hubungan antara negara dan rakyat serta meningkatkan tanggung jawab politik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang melayani kepentingan masyarakat (paradigma lama layanan publik).

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik dapat didefinisikan sebagai pola atau fokus dan locus (posisi) administrasi publik (Widanti, 2022:30). Paradigma

administrasi publik berkembang sesuai dengan tantangan zamannya. Sebagai "trend global", itu berasal dari Benua Eropa dan Amerika Serikat dan diadopsi oleh banyak negara-negara baru yang baru saja memerdekakan diri dari penjajahan atau menjadi negara persemakmuran (Febriadi, 2022). Fredrickson (2003) mengisolasi pandangan dunia negara atau organisasi terbuka ke dalam lima kategori: (1) birokrasi klasik; (2) birokrasi neo-klasik atau neo-birokrasi; (3) mengajar dan mendidik; dan (4) pilihan terbuka. Senada dengan Henry (1988), organisasi terdiri dari lima komponen: (1) pandangan dunia tentang pembagian isu legislatif yang berwenang; (2) standar organisasi; (3) organisasi sebagai ilmu politik; dan (4) organisasi terbuka sebagai organisasi.

Paradigma administrasi publik mencakup beberapa tahapan berikut (Widanti, 2022:30-31):

1. Paradigma I: Dikotomi Administrasi Publik-Politik

Pelopop pandangan dunia I adalah Leonard D White. Selaras dengan pandangan dunia divisi politik-administratif, terdapat dua pekerjaan organisasi terbuka, khususnya masalah legislatif dan organisasi. Lokus organisasi terbuka bekerja setelah masalah legislatif bekerja atau mendefinisikan pengaturan. Pusat organisasi terbuka tampaknya adalah pada naungan politik. Administrasi publik adalah perpanjangan tangan politik dalam melaksanakan kebijakan politik. Ketika politik berakhir, administrasi publik mulai. Pandangan dunia ini menggambarkan

hubungan antara masalah legislatif dan organisasi sebagai dua sisi mata uang yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain.

2. Pandangan Dunia II: Premis Organisasi Terbuka (1927-1937)

Pandangan Dunia II tidak mempertanyakan lokus organisasi publik. Sebaliknya, ia akan menekankan penerapan standar-standar yang berwenang seperti efisiensi, produktivitas, kecukupan, pengajaran, partisipasi, koordinasi, dan sebagainya. Pandangan Dunia II FW Taylor didasarkan pada empat standar dasar organisasi terbuka, khususnya bahwa ilmu manajemen sejati harus diciptakan untuk mewujudkan pelaksanaan yang unggul; melakukan penanganan pilihan yang logis sehingga pekerja dapat diandalkan untuk pekerjaan mereka; memberikan instruksi dan pengembangan pekerja secara wajar; dan menutup partisipasi antara karyawan dan atasan. Henry Fayol dan Leonard D Whitmore kemudian menciptakan standar organisasi terbuka FW Taylor.

3. Pandangan Dunia III: Organisasi Terbuka sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Penulis pandangan dunia ini adalah Chester I Barnard, Dwight Waldo, dan Herbert Simon. Pandangan dunia III tentang organisasi terbuka kembali ke bidang ilmu politik, dengan organisasi terbuka yang ditempatkan sebagai pejabat politik. Nilai-nilai bebas tidak dapat dicampuri dengan penggunaan organisasi terbuka..

4. Pandangan Dunia IV : Organisasi Terbuka sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Beberapa pendiri pandangan IV ini mengatakan administrasi publik kembali. Tidak ada perbedaan antara administrasi publik dan administrasi bisnis di paradigma ini karena administrasi publik difokuskan pada penerapan teori-teori ilmu manajemen dan organisasi. Fokus keduanya adalah produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

5. Pandangan Dunia V: Organisasi sebagai Administrasi Publik

Penulis pandangan dunia ini menggabungkan Amitai Etzioni dan Gerald Caiden. Pandangan dunia V mempertahankan organisasi terbuka dengan menerapkan standar dan kapasitasnya. Pandangan dunia ini menggabungkan administrasi terbuka, hipotesis organisasi terbuka, masalah legislatif keuangan terbuka, investigasi, dan metode pembuatan kesepakatan terbuka.

6. Paradigma *Old Public Administration* (OPA)

FW Taylor, Henry Fayol, dan Woodrow Wilson adalah figur pemerintahan lama. Administrasi publik klasik adalah istilah lain untuk paradigma administrasi publik lama memiliki strategi dan penggunaan administrasi. Fokus awal administrasi publik lama mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang berpusat pada pekerjaan.

7. Paradigma *New Public Administration* (NPA)

Paradigma pemerintahan baru berbeda dengan paradigma pemerintahan lama. Aparat publik baru mulai memperhatikan kebutuhan orang-orang setelah administrasi publik lama berfokus pada pekerjaan. Sejak tahun 1960-1970, paradigma administrasi publik baru muncul. Paradigma ini

tidak hanya mengutamakan efektivitas dan efisiensi, untuk mengaktualisasikan keadilan sosial dan menganggap rasa hormat manusia sebagai pelaksana organisasi terbuka. Dengan cara ini, pendekatan yang digunakan untuk pengaturan pemerintahan baru menggabungkan aspek sosiologis dan psikologis.

8. Paradigma *New Public Management* (NPM)

Pandangan dunia organisasi terbuka yang belum digunakan dikembangkan dari Osborne dan Gaebler (1992) yang mengusulkan administrasi kewirausahaan, atau mengulang pemerintahan, dengan sepuluh standar yang harus diikuti oleh pemerintahan. Ide dasar dari reinventing government adalah bahwa pemerintahan tidak efisien sehingga perlu mengikuti sepuluh prinsip tersebut..

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian hal yang harus atau harus dilakukan, dan merupakan keputusan pemerintah apakah individu atau kelompok pemangku kepentingan akan mengikutinya atau tidak. Dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan publik memberikan sanksi yang mengakibatkan permasalahan tersebut mendapat perhatian penuh dari pemerintah (Marwiyah, 2022: 12). Menurut Dewi (2022: 2), Keamanan adalah pilihan yang dibuat oleh seorang individu yang memegang kendali terbuka yang merugikan banyak orang. Pendekatan terbuka dibuat oleh individu atau oleh pemegang perintah yang diberikan oleh individu secara keseluruhan. Mayoritas rakyat mewakili kebijakan publik.

Kebijakan publik sebagai suatu wilayah pemerintahan yang kompleks dan strategis yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Memahami konsep dan ruang lingkup kebijakan publik memerlukan pemahaman mendalam tentang proses yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Dengan memahami konsep dan ruang lingkup kebijakan publik, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk menanggapi perubahan sosial dan memastikan bahwa tindakan yang dihasilkan memberikan manfaat. Alhasni (2024: 1)

Menurut pemaparan para ahli, kebijakan publik adalah peraturan atau tata kelola yang dibuat oleh pemerintah dan digunakan mengatasi berbagai problem kehidupan, kebutuhan, dan politik. Edward III (Mansur, 2023) mengidentifikasi elemen yang dianggap berkontribusi signifikan terhadap implementasi kebijakan: struktur aturan, sumber daya manusia (SDM), penunjang dan pelaksana, dan komunikasi. Setiap dimensi mempengaruhi dimensi lainnya secara langsung dan tidak langsung. Sebaliknya, Inggris (2022: 82-86) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik menjadi dua jenis: (1) faktor internal, seperti diskusi, SDM, temperamen dan pelaksana, dan organisasi urutan; saya melakukannya; (2) faktor eksternal, seperti saya. Ini mencakup potensi populasi, sumber daya alam, kemajuan teknologi, kondisi ekonomi, budaya, dan dinamika politik lokal.

Ada sejumlah variabel yang mempengaruhi pembentukan kebijakan publik, termasuk tekanan dari luar (dikenal sebagai "eksternal tekanan"), pengaruh kebijakan konservatif yang lama, pengaruh sifat pribadi, dan pengaruh luar kelompok. Dijelaskan bahwa ada dampak dari kondisi masa lalu dan institusi. Menurut penelitian ahli, birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan sikap dan temperamen pelaksana mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Efisiensi, kecukupan, daya tanggap, akurasi, dan arah adalah beberapa pengukuran yang dapat digunakan untuk mensurvei pelaksanaan pendekatan terbuka. Menghasilkan dan menganalisis data tentang kinerja dan hasil kebijakan dengan menggunakan berbagai standar. Perbedaan utama antara kriteria yang direkomendasikan dan kriteria evaluasi adalah kapan mereka diterapkan Kriteria penilaian digunakan secara reflektif (*ex post*), sedangkan saran digunakan secara tentatif (*ex bet*) ini menurut Soenarjanto (2019). Faktor-faktor berikut terlibat implementasi aturan: penghematan, keefektifan, adil, akuntabel, transparansi, dan konsistensi. Desrinelti *et al.* (2021),

Implementasi kebijakan dapat diukur dan dinilai berdasarkan konsistensi, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, menunjukkan elemen komunikasi seperti penyampaian, konsistensi, dan kejelasan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Mansur (2021)

Menurut para ahli, hal-hal seperti konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi dapat digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan publik.

1.5.5 Proses Kebijakan Publik

Pada kenyataannya, pendekatan terbuka atau pemerintahan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perincian, penggunaan, serta penilaian dan evaluasi. Memang benar bahwa tahap penyusunan agenda adalah tahap pertama yang dilakukan sebelum kegiatan perumusan kebijakan. Sebaliknya, setelah tahap perumusan kebijakan, kegiatan adopsi kebijakan dilakukan sebelum kegiatan implementasi kebijakan (Abdoellah dan Rusdiana, 2016:38). Penjelasan lengkap dapat ditemukan di bawah ini.

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sebelum perumusan kebijakan, Rencana pendekatan ditetapkan untuk memutuskan masalah terbuka yang harus ditangani. Pada dasarnya, masalah muncul selama proses penyusunan masalah; ini adalah proses di mana masalah kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan.

2. Penyusunan Pemilihan Tata Kelola

Jika penyusunan tata kelola digunakan untuk merencanakan dan memberikan masukan bagi definisi kebijakan, maka pemilihan tata kelola merupakan tata kelola di mana pilihan tata kelola diputuskan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat (termasuk pelaku seni atau pihak yang

berkepentingan). Setelah melalui proses penyusunan usulan, tata kelola ini dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut..

- a. Mengidentifikasi pilihan kebijakan (peraturan perundang-undangan elektif) yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang diharapkan dan merupakan langkah terbaik untuk mencapai tujuan tertentu dan kemajuan bersama.
- b. Mengidentifikasi kriteria pemilihan kriteria tertentu untuk meninjau pilihan-pilihan tersebut.
- c. Menilai pilihan-pilihan tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria penting sehingga dapat diketahui dampak positif dari pilihan-pilihan tersebut

Perspektif kebijakan publik memandang penyusunan tata kelola sebagai suatu siklus yang terdiri dari berbagai tahapan yang berkesinambungan. Proses penyusunan kebijakan publik meliputi masalah identifikasi bukti, penetapan motivasi, pembuatan tata kelola, keaslian tata kelola, pelaksanaan tata kelola, dan penilaian. Tahapan-tahapan penyusunan ini menunjukkan bahwa suatu tata kelola berhubungan dengan tata kelola sebelumnya dan mempengaruhi tata kelola yang lain ini menurut Abdullah *et al.* (2022). Sedangkan Maulana dan Nugroho (2019:46) menjelaskan analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas latihan mental yang dilakukan di tengah-tengah latihan politik. Latihan-latihan ini mencakup pengaturan motivasi, definisi pendekatan, pemilihan rencana, pelaksanaan rencana, dan

penilaian rencana, serta latihan perincian masalah, perkiraan, saran rencana, pemeriksaan, dan penilaian rencana.

Sebagai kesimpulan dari penjelasan ahli tersebut, kita dapat mengatakan bahwa proses pembentukan dan analisis kebijakan publik terdiri dari berbagai tahapan yang saling berhubungan. Pembentukan kebijakan publik mencakup berbagai tahapan, termasuk identifikasi masalah, Pengaturan motivasi, pembuatan rencana, legitimasi pendekatan, penggunaan rencana, dan penilaian rencana. Setiap rencana mempengaruhi tahap-tahap lainnya. Namun, pemeriksaan pendekatan terbuka mencakup latihan mental yang termasuk dalam pegangan politik, seperti pengaturan motivasi, definisi pendekatan, apropriasi, penggunaan, dan penilaian. Ada juga latihan mental lainnya, seperti perincian masalah, harapan, saran rencana, pengamatan, dan penilaian rencana.

1.5.6 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil setelah pengambilan keputusan sebelumnya. Tindakan ini termasuk usaha terus-menerus untuk menciptakan perubahan yang luas dan kecil yang merupakan hasil dari pilihan politik pemerintah untuk mencapai tujuan lain ini menurut Septa Winarti *et al.* (2020). Untuk mencapai tujuannya, implementasi kebijakan adalah caranya (Pramono, 2020:2). Yuliah (2020) mengatakan implementasi kebijakan adalah proses menerapkan, menerapkan, dan menerapkan keputusan kebijakan serta alternatifnya dengan tujuan mencapai terjadi yang sejalan dengan tujuan dan sasaran pendekatan. Lebih lanjut,

menurut Maulana dan Nugroho (2019:95), salah satu tahapan penyusunan pendekatan setelah penyusunan definisi pendekatan terbuka adalah penyusunan rencana. Rencana ini sangat penting bagi pengelolaan pendekatan, terlepas dari apakah pendekatan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Hasil diskusi para ahli menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah langkah melaksanakan kebijakan dengan tujuan mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan atau direncanakan.

Pada dasarnya, model implementasi kebijakan adalah gambaran sederhana tentang bagaimana implementasi kebijakan publik terjadi di dunia nyata. Sebagai contoh, Suparno (2017: 22-31) menjelaskan berbagai model pelaksanaan kebijakan:

1. Pertunjukan Eksekusi Susunan Terbuka Grindle Pertunjukan eksekusi pendekatan digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu pendekatan dalam memahami masalah yang berkaitan dengan kualitas substansi atau isi susunan dan pengaturan penggunaan pendekatan.
2. Pertunjukan Penggunaan Susunan Terbuka Van Meter-Van Horne Pertunjukan ini berpendapat bahwa pelaksanaan pendekatan terbuka, penggunaan, dan pelaksanaan susunan terbuka berhubungan langsung dengan pertunjukan penggunaan pendekatan terbuka.
3. Model implementasi kebijakan publik oleh Mazmanian dan Sabatier . Mazmanian dan Sabatier memiliki model implementasi yang disebut Model Kerangka Analisis Implementasi. Mereka menggunakan model

Kerangka Analisis Implementasi (*Framework for Implementation Analysis*) untuk mengelompokkan proses implementasi kebijakan menjadi tiga variabel: variabel independen, variabel *intervening*, dan variabel ekstra kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi.

4. Model George C. Edward III untuk Penggunaan Pendekatan Terbuka: Empat komponen mempengaruhi pelaksanaan pendekatan terbuka: komunikasi, struktur organisasi, aset, dan sikap.

Sebaliknya, Ravyansah *et al.* (2022: 68-74) menggambarkan model implementasi arahnya sebagai berikut..

1. Masalah Penggunaan Pendekatan Demonstrasi George C. Edward III membagi pendekatan eksekusi menjadi dua model: pengaruh koordinat dan pengaruh tidak langsung.
2. Pertunjukan Penanganan Eksekusi dilakukan dengan pendekatan top-down, dan model ini mencakup enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.
3. Model Proses Administratif dan Politik oleh Marile S. Grindle: Model implementasi Grindle menggunakan dua variabel untuk keberhasilan implementasi: variabel konteks kebijakan dan variabel isi kebijakan. Variabel isi kebijakan mengacu pada deskripsi kebijakan. Variabel konteks kebijakan mengacu pada bagaimana kebijakan yang ditetapkan mempengaruhi proses administratif dan politik.
 - a. Model Transaksional (oleh Donald P. Warmick) Berbagai faktor mendorong dan menghambat implementasi selama fase implementasi.

Perencanaan mencakup empat komponen utama: kemampuan analisis, kemampuan organisasi, kemampuan staf, dan kualitas informasi yang dibutuhkan.

- b. Model Investigasi Eksekusi ditulis oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Menyetujui acara ini, faktor-faktor harus dikenali dalam pemeriksaan penggunaan pendekatan.
- c. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menerima dalam demonstrasi top-down bahwa kondisi tertentu penting untuk pelaksanaan pendekatan ideal. Dengan kata lain, a) Kondisi lingkungan eksternal yang dihadapi oleh organisasi pelaksana tidak menimbulkan masalah yang signifikan. b) Ada aset dan waktu yang memadai. c) Ada koordinasi yang dekat antara sumber data yang dapat diakses. d) Pengaturan yang diaktualisasikan mencakup asosiasi kausal, yang terkoordinasi dan tidak memiliki banyak rantai koneksi. e) Hubungan kausal terkoordinasi dan tidak memiliki banyak rantai koneksi.
- d. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menerima dalam demonstrasi top-down bahwa kondisi tertentu penting untuk penggunaan pendekatan kulminasi. Dengan kata lain, a) Kondisi alam luar yang dihadapi oleh organisasi pelaksana tidak menimbulkan masalah kritis. b) Ada aset dan waktu yang memadai. c) Ada koordinasi yang erat antara sumber informasi yang ada. d) Kebijakan yang dilaksanakan memiliki hubungan sebab akibat (causal connection), yang bersifat langsung dan tidak memiliki banyak rantai hubungan. e) Hubungan

sebab akibat (kausal) bersifat langsung dan tidak memiliki banyak rantai hubungan..

e. Model Dampak Kebijakan

Untuk meningkatkan pemahaman dan evaluasi penelitian kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan penelitian yang melihat dampak kebijakan publik.

Dalam kebijakan publik, implementasi kebijakan sangat penting, tetapi prosesnya sangat kompleks sehingga kebijakan tertentu mungkin berbeda dari kebijakan lainnya. Komunikasi, aset, sikap, dan struktur birokrasi merupakan komponen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, menurut Septawinalti *et al.* (2020). Komponen yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan adalah, menurut Edward III (Pramono, 2020:17-19).:

1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan, para pelaksana harus mengetahui secara tepat apa yang harus mereka lakukan terkait dengan penerapan kebijakan. Selain itu, kelompok sasaran politik juga harus dididik mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini penting untuk menghindari penolakan dari kelompok sasara.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan informasi namun juga pada sumber daya yang tersedia bagi para implementasi.

Sumber daya manusia pasti akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia, terutama keterampilan implementasi, dan sumber daya keuangan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Di sini, disposisi mengacu pada sifat dan kepribadian pelaku, seperti komitmen, integritas, dan sifat demokratis, antara lain. Faktor utama kebijakan adalah standar pelaksanaan kebijakan..

4. Struktur Aturan

Aturan adalah suatu kelompok yang berfungsi melaksanakan aturan dan sangat mempengaruhi pelaksanaannya. Prosedur operasional standar (SOP) diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan dengan sukses.

Menurut Prayoga dan Yuhertiana (2021), faktor yang berpengaruh di organisasi sektor publik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Struktur Birokrasi: struktur birokrasi melakukan fungsi penting dalam konteks kebijakan, yaitu membuat standar operasional prosedur (SOP).
2. Sumber Daya: sumber daya penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena sumber daya ini diperlukan untuk mempercepat proses pengelolaan.
3. Komunikasi pengambil keputusan dan pelaksana dapat melaksanakan aturan dalam pemerintah yang dilakukan di masyarakat dengan lebih konsisten.

4. Tugas adalah pelaksanaan rencana atau program; kebijakan sudah disepakati memerlukan kemauan dan komitmen yang kuat dari para pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan.

Teori-teori yang berbeda digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan. Tiga indikator digunakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, menurut Ripley and Franklin (Febriyanti dan As'ari, 2023): tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan kelancaran pelaksanaan operasional sehari-hari. Di sisi lain, Purwanto (2015:106-110) mengemukakan bahwa ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pendekatan.

1. Memberikan kesempatan kepada semua kelompok sasaran tanpa mempertimbangkan karakteristiknya, seperti jenis kelamin, suku, agama, atau aliansi politik. Pendekatan juga berarti tidak membedakan dalam mengambil bagian dan menggunakan program serta solusi berdasarkan karakteristik kelompok atau individu yang menarik.
2. Bias: Digunakan untuk menilai apakah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan bersifat bias (menyimpang) terhadap kelompok tidak berhak menerima dukungan atau layanan pemerintah berdasarkan kebijakan atau program.
3. Keakuratan Hasil Kerja: Indikator ini menilai apakah hasil yang disampaikan dalam pelaksanaan program disampaikan tepat waktu.
4. Akuntabilitas: Indikator ini menilai apakah tindakan pelaksana dapat dipertanggung

5. Program-Need Fit: mengevaluasi hasil dari di antara program dan rencana yang dilakukan oleh sekelompok orang sasaran memenuhi kebutuhan mereka.

Hal ini berbeda dengan Rasman dkk. (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator berikut:

1. Kejelasan Isi

Kebijakan Kebijakan yang jelas dan rinci lebih mudah diterapkan karena pelaksana dapat dengan mudah memahami dan menerjemahkannya menjadi tindakan.

2. Landasan Teoritis Kebijakan

Kebijakan yang berfokus pada landasan teoretis lebih dapat dilaksanakan karena telah diuji.

3. Alokasi sumber daya keuangan

Tingkat alokasi sumber daya keuangan terhadap suatu kebijakan sangat penting bagi kebijakan tersebut.

4. Kolaborasi dan dukungan antar lembaga pelaksana yang berbeda

Indikator ini mengkaji tingkat kolaborasi dan dukungan antar lembaga pelaksana yang berbeda.

5. Kejelasan dan Konsistensi Aturan Entitas

Pelaksana Entitas pelaksana mempunyai aturan tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai entitas implementasi kebijakan.

6. Adanya komitmen formal terhadap tujuan kebijakan

Tingkat komitmen pejabat pelaksana kebijakan merupakan indikator yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

7. Akses Kelompok Eksternal yang Berpartisipasi

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana akses dan peluang kelompok di luar otoritas pelaksana mempengaruhi pendukung dan pelaksana kebijakan.

Melalui implementasinya tujuan dan hasil yang diinginkan dapat dicapai. Implementasi kebijakan publik mencakup intervensi atau manipulasi terhadap elemen tertentu dalam kehidupan bersama, seperti yang termasuk dalam formulasi kebijakan, menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia finansial dan organisistik (Sutmasa, 2021).

Tiga hal yang senantiasa dibutuhkan dalam pelaksanaan pendekatan terbuka adalah: tujuan atau sasaran dari pengaturan; adanya kegiatan atau latihan untuk mewujudkan sasaran tersebut; dan adanya akibat dari kegiatan tersebut (Sutmasa, 2021). Lebih lanjut, Edward III menyebutkan komponen-komponen berikut: sumber daya, komunikasi, sikap atau perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi. Komponen-komponen tersebut dianggap turut berperan dalam penggunaan pengaturan. Penggunaan pengaturan dipengaruhi oleh keempat komponen tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing komponen saling mempengaruhi (Wahyudi, 2016).

Indikator pelaksanaan pendekatan terbuka adalah akses, predisposisi, ketepatan manfaat, tanggung jawab, dan kesesuaian program dan kebutuhan.

Konsistensi, keterusterangan, tanggung jawab, kewajaran, efektivitas, dan produktivitas merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendekatan terbuka menurut Purwanto (2015:106-110). Sementara itu, penilaian terhadap penggunaan pendekatan harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi penilaian ex-ante, progressive, dan ex-post. Hal ini memungkinkan adanya kemajuan dan terobosan dalam membuat langkah-langkah layanan publik. Pelaksanaan pendekatan terbuka dapat membuat keputusan sendiri jika tidak sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku (Ramdhani dan Ramdhani, 2017).

1.5.7 Jenis Implementasi Kebijakan Publik

Model eksekusi pengaturan terbuka yang disetujui oleh Gortner Harold, 2001 (dalam Yamin M. N, 2016), meliputi:

1. Van Meter dan Van Horn Demonstrate

Sesuai dengan pertunjukan ini, eksekusi pengaturan terbuka berjalan langsung dari pengaturan terbuka, implementer, dan eksekusi nya. Beberapa faktor yang termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi pendekatan terbuka, implementer, dan eksekusinya adalah latihan penggunaan dan komunikasi antar-organisasi, karakteristik agen/implementor yang mengaktualisasikan.

2. Mazmanian dan Sabatier Demonstrate

Pertunjukan ini mengkategorikan tiga faktor dalam pegangan eksekusi pendekatan: faktor bebas, faktor perantara, dan faktor bawahan.

3. Model Hogwood dan Gunn

Model ini didasarkan pada konsep manajemen strategis, yang meninggalkan prinsip dasar untuk praktik manajemen yang sistematis. Kelemahan dari konsep ini adalah bahwa mereka tidak secara eksplisit mengidentifikasi istilah.

4. Model Goggin Bowman Lester

Tujuan untuk menghasilkan model yang "lebih ilmiah" dengan menggunakan model "metode riset" dan menggunakan faktor bebas, mediasi, dan subordinate. Dalam perluasan, "komunikasi" menghitung kapasitas sebagai pendorong dalam penggunaan pengaturan.

5. Model Grindle

Pertunjukan ini diputuskan oleh substansi pendekatan dan pengaturan penggunaannya. Pada dasarnya, penggunaan pendekatan dimulai dengan perubahan pendekatan. Kemenangan diputuskan oleh seberapa efektif pengaturan tersebut disebarkan.

6. Model Elmore

Pertunjukan eksekusi ini dimulai dari jenis pengaturan publik yang memberi energi kepada publik untuk mengaktualisasikan pengaturan itu sendiri atau melibatkan otoritas pemerintah, tetapi sebagaimana adanya pada tingkat suasana hati.

7. Model George C. Edward III

Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama kelengkapan publik kurangnya perhatian terhadap implementasi. Menurutny, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berjalan dengan sukses tanpa implementasi

yang efektif. Edward menyarankan agar implementasi Pengaturan menjadi sukses dengan mempertimbangkan empat isu fundamental: komunikasi, aset, sikap, dan struktur birokrasi.

8. Pertunjukan Nakamura dan Smallwood

Pertunjukan ini menggabungkan pengaturan pendekatan dengan pelaksanaan pendekatan. Spesialis pengaturan sangat tertarik dengan konsep ini, yang mendekatkan peneliti pengaturan dan profesional pendekatan. Dengan cara ini, individu yang tahu cara mengaktualisasikan pendekatan dapat menawarkan bantuan lebih banyak kepada kehidupan bersama. Ini berarti bahwa informasi seputar pelaksanaan pengaturan saat ini melibatkan para profesional dalam birokrasi dan pendidik organisasi publik lainnya, bukan hanya guru pengaturan publik..

9. Model pengaturan

Sesuai dengan pertunjukan ini, pegangan penggunaan pengaturan terdiri dari sejumlah besar artis pertunjukan yang terhubung satu sama lain dalam suatu kelompok artis pertunjukan independen. Kecerdasan karakter di layar dalam kelompok ini memutuskan bagaimana penggunaan harus dilakukan, isu apa yang harus dipertimbangkan, dan kebijaksanaan apa yang diharapkan.

1.5.8 Program Indonesia Pintar (PIP)

Pemerintah memulai PIP melalui Inpres No. 2 merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Ini mencakup siswa di jenjang sekolah dasar/sekolah menengah/sekolah

menengah, SMP/MT, SMK/SMA/MA, dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau kursus dan penyiapan pendidikan dimulai dari keluarga atau keluarga dengan status ekonomi sangat kurang di seluruh tanah air. Berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 diubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria. Ta, kita akan memberikan KIP untuk membiayai kuliah secara tunai. Kelompok Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mampu untuk menyalurkan program Kartu Indonesia Cerdas (KIP) oleh pemerintah.

Landasan hukum pelaksanaan Program Indonesia Cerdas adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kerangka Kerja Pembangunan Nasional, dan pemenuhan janji Presiden Republik Indonesia. Keputusan kampanye penyediaan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Cadangan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Cerdas, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Sejahtera No. 7

Salah satu program nasional yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, adalah Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan tujuan berikut:

1. Meningkatkan keberlanjutan akademik
2. Mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama antara pria dan wanita, perkotaan dan pedesaan, serta antar kabupaten, dan antar kelompok masyarakat, khususnya antara yang mampu dan yang tidak mampu, ditandai dengan tingkat putus sekolah dan retensi yang rendah
3. Meningkatkan kesiapan siswa SMP dan SMA untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan tinggi

Besarnya simpanan KIP berubah sesuai dengan jenjang pendidikan. SD/MI/Pondok Pesantren Formal, Pondok Pesantren, dan penerima paket APPS untuk pendidikan dasar sebesar Rp400.000,- untuk SMP/MTs/SMK/SMK, Pondok Pesantren, jalur B sebesar Rp 500.000,- untuk SMA/SMK/SMK/SMK/SMK, dan paket C sebesar Rp700.000,- untuk guru kursus atau pelatihan (Nurohmah, 2021)

1.5.10 Komunikasi (X1)

Secara etimologis, kata "komunikasi" adalah terjemahan dari kata "komunikasi" dalam bahasa Inggris. Bahasa Latin untuk "komunikasi" berasal dari kata "communis", yang berarti "sama atau setara," dan "communico", yang berarti "bersama membuat. Istilah pertama, "Komunis", adalah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana orang berbagi makna satu sama lain melalui pesan komunikasi. Ide dan pemikiran yang diubah menjadi simbol yang memiliki makna dan dimiliki oleh orang yang berkomunikasi adalah contoh pesan komunikasi. Haryanto (2021: 15)

Komunikasi adalah aktivitas paling penting dalam kehidupan manusia, menurut Simbolon et al. (2022:1). Interaksi sehari-hari sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Sebaliknya, Mansur (2021) mengatakan bahwa komunikasi adalah aktivitas di mana orang lain memahami ide-ide, terutama maksud pembicara atau penulis, melalui sistem simbol, sinyal, dan tindakan bersama. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan komunikasi yang buruk dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kami mengambil kesimpulan dari diskusi para ahli bahwa penelitian ini mendefinisikan komunikasi sebagai tindakan individu untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka melalui simbol-simbol yang memiliki makna; ini berlaku untuk kebijakan publik.

Elemen komunikasi terdiri dari pengirim atau penyampai pesan (yaitu, pesan), media (saluran), penerima atau pemancar pesan, dan efek atau umpan balik. Semua elemen ini diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dan program yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. "Siapa, melalui saluran apa, dan untuk siapa, serta pengaruh seperti apa" adalah unsur-unsur yang dapat digunakan untuk menjelaskan komunikasi menurut Lasswell (Rachmawati et al., 2019), tetapi Pureklolon (2016:4-5) berpendapat bahwa Hariyanto (2021:29) memberikan penjelasan sebelum orang dapat memahami proses. Menguraikan komponen komunikasi: sumber, komunikator/ komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan akibat, serta umpan balik (feedback) dan kebisingan.

Menurut penelitian para ahli, elemen komunikasi termasuk sumber, pesan, saluran atau medium, pengirim berita, hasil, umpan balik, dan gangguan.

Tujuh komponen mempengaruhi komunikasi, menurut Cutlip dan Allen (2018): (1) Keandalan Ini berkaitan dengan kepercayaan antara pemancar dan conveyer, dan (2) konteks, yang berkaitan dengan hubungan antara situasi dan kondisi di mana komunikasi terjadi secara langsung. (3) Isi adalah informasi yang dikirimkan dari satu koresponden ke koresponden lainnya. (4) Kejelasan adalah gambaran akurat tentang informasi yang disampaikan oleh komunikator. (5) Kontinuitas dan konsistensi memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan tepat. (6) Saluran distribusi adalah cara atau metode untuk menyampaikan pesan.

Bertentangan dengan Kinasih (2022) yang mengatakan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi komunikasi. (1) pengetahuan; (2) persepsi, yaitu cara seseorang menerima informasi; (3) lingkungan, yaitu suasana yang nyaman yang mendukung komunikasi efektif; dan (4) emosi, yaitu bagaimana dampaknya terhadap seseorang saat berkomunikasi. Sebaliknya, lima ciri komunikasi (Galih dan Fauziah, 2019).

1. Keterbukaan adalah pemicu kesediaan seseorang untuk terbuka dan menyampaikan informasi secara jelas dan jelas kepada orang lain. Keterbukaan berarti jujur, mampu memberikan jawaban positif.

2. Empati adalah emosi yang membuat orang seakan apa yang ikut apa yang orang lain rasakan, diluar dari apakah mereka kehilangan identitas dirinya atau tidak.
3. Sikap suportif adalah perilaku seseorang yang mengungkapkan sikapnya untuk membantu orang lain mengetahui apa yang mereka rasakan.
4. Sikap positif, toleransi, dan kemampuan berperan lebih aktif dalam memberikan masukan kepada orang lain dengan baik dan bijaksana.
5. Kesetaraan adalah sikap yang memperlakukan semua orang dengan setara atau setara, tanpa membedakan budaya mereka.

Komunikasi yang baik memastikan pemahaman kebijakan yang tepat dan akurat serta pelaksanaannya yang efektif dan efisien. Keberhasilan komunikasi dapat diukur dengan tiga ukuran (Sutmasa, 2021).

1. Transmisi: Komunikasi yang efektif juga akan menghasilkan implementasi yang efektif..
2. Keterbukaan: Pelaksana harus mengirimkan informasi dengan cara yang jelas dan tidak membingungkan. Ambisi selalu menghambat implementasi.
3. Konsistensi: Saat melaksanakan komunikasi, petunjuk harus konsisten (tidak dapat diubah) dan jelas.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Rangkuti (2021), yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif tentang pelaksanaan kebijakan dapat diukur melalui tiga metrik.

1. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pemanfaatan yang baik.

2. Data yang diperoleh oleh pelaksana pengaturan harus jelas dan tidak membingungkan atau mudah dipahami.
3. Informasi yang disampaikan, terutama informasi dan perintah yang dikomunikasikan, harus tidak hanya konsisten, tetapi juga jelas agar dapat dilaksanakan.

Komunikasi harus mempertimbangkan tiga hal, menurut Roesli dan Bachtiar (2018):

1. Transformasi, atau transmisi, adalah proses penyebaran informasi oleh pembuat rencana kepada pelaksana rencana, kelompok sasaran, dan pihak terkait.
2. Kejelasan, pengukuran kejelasan memerlukan penerangan penggunaan agar memuaskan bagi pelaksana rencana, dan data harus jelas dan sederhana untuk menghindari kesalahan.
3. Konsisten: Informasi yang diberikan untuk implementasi kebijakan harus jelas dan mudah dipahami.

1.5.11 Sumber Daya (X2)

Sumber daya didefinisikan sebagai peralatan pelaksanaan. Birokrasi pelaksanaan kebijakan, yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif jika tidak ada sumber daya dengan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja (Igirisa, 2022: 67). Menurut Indah dan Hariyanti (2018), "Sumber daya mencakup jumlah pegawai yang cukup untuk melaksanakan kebijakan." Salah satu penanda terpenting untuk keberhasilan

penggunaan rencana. Aset berperan penting dalam pelaksanaan program dan rencana. Aset efektif yang diperkuat oleh rencana yang dilaksanakan menjamin bahwa arahan tetap konsisten dan jelas, yang mana informasi yang dikomunikasikan akurat (Edyanto et al., 2021).

Klarifikasi para spesialis bahwa aset, khususnya birokrasi, berperan dalam keberhasilan pelaksanaan rencana. Aset yang kompeten dapat menyebabkan penggunaan rencana yang tidak efektif. Aset ini mencakup staf yang memuaskan, arahan yang stabil, dan data yang jelas. Kelayakan rencana yang baik bergantung pada efisiensi aset.

Tentu saja, sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang efektif juga menghambat pelaksanaannya karena kepentingan pribadi diperhitungkan. Sumber daya Model Edward III adalah

1. Sumber Daya Manusia: Pelaksana kebijakan publik harus memiliki Aset manusia yang memadai dan memiliki kompetensi memadai.
2. Informasi: ada dua jenis informasi: Data pelaksanaan pendekatan dan data serta informasi kepatuhan pelaksana terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian pemerintah.
3. Kewenangan adalah kewenangan atau legitimasi formal yang dimiliki pelaksana untuk menjamin keterukuran dan keamanan pelaksanaan dari sudut pandang hukum formal.
4. Sarana terdiri dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan publik dan harus dibangun.

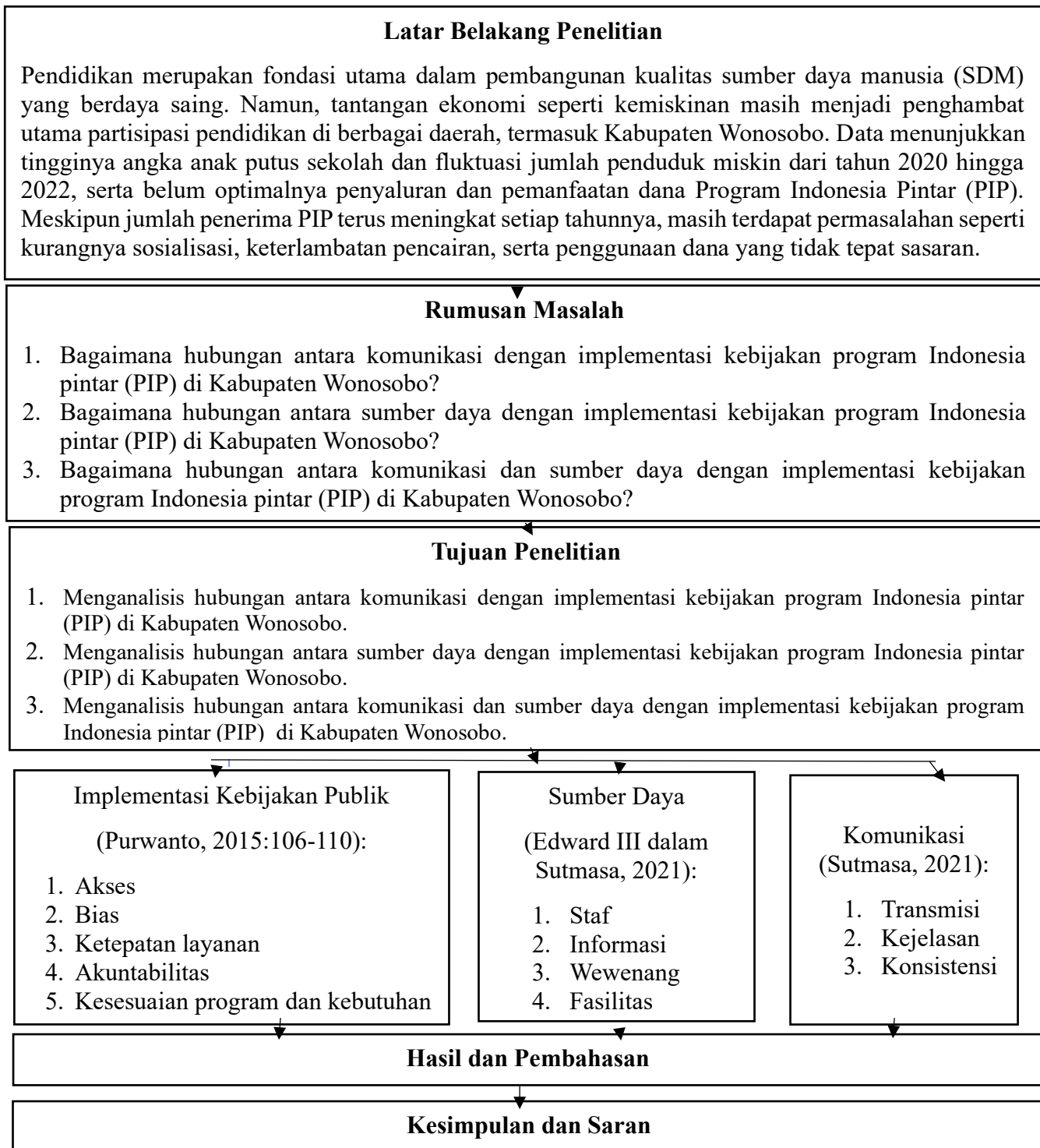
Orang, informasi, kewenangan, dan fasilitas adalah komponen sumber daya menurut Laary *et al.* (2022),. Sebaliknya, seperti yang dijelaskan oleh Roeslie dan Bachtiar (2018), Pelaksanaan rencana harus didukung oleh aset seperti aset manusia, anggaran, dan sarana. Aset tersebut meliputi: 1. Sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang memadai secara kualitas dan kuantitas merupakan faktor terpenting dalam penggunaan pendekatan. 2. Anggaran: Anggaran mengacu pada ketersediaan sumber daya untuk merencanakan dan melaksanakan program atau rencana guna menjamin pelaksanaan rencana. 3. Kesesuaian sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dikenal sebagai fasilitas.

Sumber daya penting dalam implementasi kebijakan, menurut Wahyuni (2022) adalah sebagai berikut: 1. Tenaga pelaksana yang cukup, berpengalaman, dan kompeten di bidangnya masing-masing; 2. Informasi berupa data yang disusun dalam format yang dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan; dan 3. Berbagai bentuk kewenangannya, mulai dari pemerintahan hingga undang-undang.

1.5.12 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 2

Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Dari Berbagai Sumber (2025)

Berdasarkan kerangka teori/konsep tersebut keterkaitan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Administrasi Publik > Implementasi Kebijakan Publik

Hubungan antara organisasi terbuka dan penggunaan pendekatan terbuka sangatlah dekat karena administrasi publik berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip-prinsip administrasi publik seperti birokrasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang efektif.

2. Implementasi Kebijakan > Komunikasi dan Sumber Daya

Bagian komunikasi dan aset sangatlah penting untuk penggunaan pengaturan. Dengan komunikasi yang berhasil, mitra dapat menyesuaikan apa yang sedang dilakukan oleh aset dengan apa yang direncanakan. Selain itu, para pelopor dapat memberikan arahan kepada staf atau pihak-pihak yang memiliki minat dalam rencana pelaksanaan pendekatan. (Fathurrohman dan Lituhayu, 2015).

Oleh karena itu, korelasi antara variabel menunjukkan bagaimana teori administrasi publik mempengaruhi manajemen publik, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada akhirnya, aspek komunikasi dan sumber daya mempengaruhi penerapan kebijakan.

1.6 Hipotesis

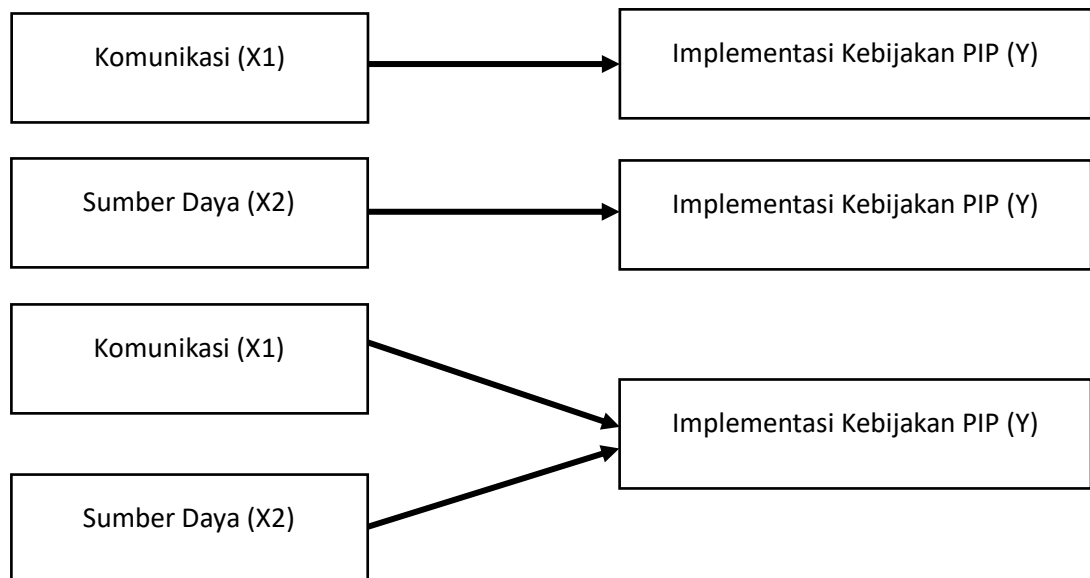
Sebuah spekulasi dapat berupa jawaban singkat yang teoritis terhadap definisi masalah penelitian. Ini memberikan ramalan tentang hubungan antara

variabel-variabel yang diamati dan dapat diuji secara empiris untuk memverifikasi kebenarannya (Abdullah et al., 2022: 49). Ini juga membuatnya mudah untuk ditulis dalam bentuk operasional dan memungkinkan evaluasi dasar informasi yang diperoleh. Teori renungan ini adalah sebagai berikut.

H₁ : Terdapat hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Wonosobo.

H₂ : Terdapat hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Wonosobo.

H₃ : Terdapat hubungan antara komunikasi dan sumber daya dengan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Wonosobo.



Gambar 1. 3
Kerangka Hipotesis

1.7 Definisi Konseptual

Menurut Pasaribu (2022: 49), definisi konseptual adalah pernyataan yang menafsirkan atau memberi makna pada suatu konsep konseptual tertentu. Definisi konseptual juga dapat didefinisikan sebagai gambaran umum dari maksud dan sifat konstitutif dari suatu konsep atau istilah. Dengan mempertimbangkan kerangka teori di atas, definisi konseptual masing-masing variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Y)

Ini mencakup upaya untuk mengubah pilihan menjadi kegiatan operasional dalam kurun waktu tertentu dan upaya terus-menerus untuk membuat perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan politik spesialis publik untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga dengan Kartu KKS atau KIP, Program PIP menawarkan bantuan pendidikan.

2. Komunikasi (X1)

Komunikasi merupakan metode penyampaian pikiran dan gagasan yang memiliki makna dan ditampilkan dalam gambar yang ditetapkan oleh pendekatan terbuka.

3. Sumber Daya (X2)

Sumber daya merupakan komponen penggunaan pendekatan birokrasi yang pada dasarnya mampu untuk keberhasilan pelaksanaan pengaturan publik.

1.8 Definisi Operasional

Peneliti membuat definisi untuk istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan tujuan untuk menyeimbangkan perspektif peneliti dan peserta penelitian (Pasaribu, 2022:67).

1. Implementasi Kebijakan PIP (Y)

Dalam pelaksanaan penataan, pendekatan dilakukan sebagai kegiatan atas pilihan-pilihan yang telah lalu. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi usaha-usaha untuk mengubah pilihan-pilihan menjadi kegiatan-kegiatan operasional dalam kurun waktu tertentu serta usaha-usaha yang terus-menerus untuk menciptakan perubahan-perubahan besar dan kecil, yang diputuskan oleh keputusan-keputusan politik para spesialis publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Akan tetapi, PIP dapat merupakan suatu program yang memberikan perbedaan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga yang memiliki KKS atau KIP untuk membiayai biaya pendidikan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PIP adalah:

a. Akses

Memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok sasaran tanpa mempertimbangkan Karakteristik mereka, seperti jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau asosiasi politik. Akses juga berarti non diskriminasi dalam berpartisipasi memanfaatkan program dan kebijakan berdasarkan karakteristik unik kelompok tersebut.

b. Bias

Apakah layanan yang diberikan oleh pelaksana bersifat sepihak (menyimpang dari) kelompok masyarakat yang tidak memerlukan dukungan atau apakah layanan yang diberikan oleh pemerintah didasarkan pada fokus kebijakan atau program pemerintah..

c. Ketepatan manfaat

Penanda ini menentukan apakah layanan yang diberikan selama pelaksanaan program tepat waktu atau tidak.

d. Tanggung jawab

Penanda ini menentukan apakah layanan yang diberikan selama pelaksanaan program tepat waktu atau tidak.

e. Kesesuaian program dan kebutuhan

Penanda ini digunakan untuk menilai apakah hasil dari berbagai program dan pendekatan yang diberikan kepada kelompok sasaran memenuhi kebutuhan mereka..

2. Komunikasi (X1)

Komunikasi adalah proses di mana orang menyampaikan ide dan pemikiran melalui simbol-simbol yang bermakna dan juga melalui kebijakan publik. Indikator komunikasi termasuk:

- a. Transmission: Komunikasi bagus akan menciptakan pekerjaan yang baik;
- b. Keterbukaan: Pelaksana harus mengirimkan informasi dengan cara yang jelas dan tidak membingungkan. Efektivitas implementasi selalu dipengaruhi oleh ambisius.

- c. Konsistensi: Saat melaksanakan komunikasi, petunjuk harus konsisten (tidak dapat diubah) dan jelas.

3. Sumber Daya (X2)

Birokrasi sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik..

- a. Staf, yaitu staf yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, harus cukup banyak dan memiliki kompetensi yang memadai;
- b. Informasi terdiri dari dua jenis: data tentang penggunaan pengaturan dan informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap arahan dan peraturan pemerintah.
- c. Wewenang: adalah wewenang atau legitimasi formal yang dimiliki oleh pelaksana untuk menjamin keterukuran dan keamanan pelaksanaan dari aspek legal-formal;
- d. Fasilitas: adalah sarana dan prasarana yang diperlukan dan dibangun untuk pelaksanaan kebijakan publik.

1.9 Metodologi Penelitian

Strategi termasuk dalam langkah-langkah pengendalian metodologis. Secara umum, istilah "strategi" mengacu pada jenis perangkat dan strategi yang digunakan oleh analis untuk mengumpulkan informasi, data, atau peristiwa eksperimental. Strategi penelitian dapat menjadi cara logis untuk mengumpulkan informasi untuk alasan atau tujuan tertentu. Prinsip sistematis,

rasional, dan empiris didasarkan pada penelitian ilmiah (Sugiyono dalam Amiruddin *et al.*, 2022:4).

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam pemikiran ini, penelitian kuantitatif dilakukan. Sejalan dengan Sugiyono (2019:13), penelitian kuantitatif dapat berupa penelitian tentang metode yang didasarkan pada logika positivisme, menggunakan populasi atau uji tertentu, sering kali menggunakan metode pengujian yang sewenang-wenang, dan menggunakan penelitian tentang peralatan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi kuantitatif atau faktual untuk menguji spekulasi yang telah ditentukan sebelumnya. Saat ini, penelitian korelasional sedang populer. Sugiyono (2019:23) menggambarkan strategi hubungan sebagai jenis penelitian yang menentukan hubungan atau tingkat hubungan antara dua faktor atau lebih tanpa melakukan upaya apa pun untuk membedakan faktor-faktor tersebut. atau melakukan manipulasi variabel. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi dan sumber daya berkorelasi dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar di Kabupaten Wonosobo.

1.9.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2017:117) mengatakan bahwa penduduk merupakan suatu wilayah umum yang terdiri dari semua benda dan objek yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang telah diketahui untuk diteliti dan ditarik kesimpulan tentangnya. Subjek penelitian ini adalah lima orang

perwakilan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wonosobo. bertanggung jawab atas program PIP. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada beberapa faktor, termasuk:

- a. Pegawai yang memiliki surat tugas yang menangani PIP.
- b. Pegawai yang menangani PIP selama 3 tahun berturut-turut.

2. Sampel

Penelitian ini mengambil sampel dari 5 orang yang menangani Program PIP.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Hal ini berkaitan dengan pengujian tak beraturan yang bersifat *purposive*. Pengujian tak beraturan yang bersifat *purposive* merupakan suatu strategi pengambilan pengujian dari komponen-komponen tertentu, menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017:68). Metode pengujian tak beraturan yang bersifat *purposive* digunakan untuk pengujian yang didasarkan pada standar lima orang. Beberapa faktor mempengaruhi pemilihan subjek penelitian, termasuk:

1. Pegawai yang memiliki surat tugas yang menangani PIP.
2. Pegawai yang menangani PIP selama 3 tahun berturut-turut

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Informasi penelitian terdiri dari dua kategori: informasi subjektif yang berupa kata-kata atau kalimat, dan informasi kuantitatif yang berupa angka-angka (Pasaribu, 2022: 112). Kategori kuantitatif dalam penelitian ini terdiri

dari tanggapan dari survei dan informasi pendukung yang digunakan untuk menganalisis wawasan. Data kualitatif penelitian ini tersedia dalam bentuk dokumen kasus, uraian rinci, dan kutipan langsung.

2. Sumber Data

Sumber informasi penelitian ini terdiri dari dua kategori: informasi penting dan informasi tambahan. Informasi penting adalah informasi yang diberikan langsung kepada orang yang mengumpulkannya (Sugiyono, 2017:308), sedangkan data tambahan adalah informasi yang tidak diberikan secara khusus kepada orang yang mengumpulkannya, seperti melalui orang lain atau catatan (Sugiyono, 2017:225). Penelitian ini, data primer digunakan. Peneliti mengumpulkan data melalui kunjungan langsung ke Dinas Pendidikan Wonosobo dan menyebarkan kuesioner kepada semua orang yang dipilih. Data sekunder terdiri dari data tambahan yang diperoleh dari pengurus Program Indonesia Pintar (PIP) Dinas Pendidikan Provinsi Wonosobo dalam bentuk dokumen

1.9.5 Skala Pengukuran

Skala ini adalah untuk mengukur sikap yang melibatkan peneliti membuat serangkaian pernyataan tentang masalah atau subjek. Selanjutnya, peserta atau responden diminta untuk menentukan apakah mereka setuju atau tidak dengan setiap item pendapat (Noor, 2018:128). Subjek memilih "sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju" sebagai jawaban untuk pernyataan pada skala ini. Bagaimana pendapat Anda tentang skala respons 1 hingga 4 yang diberikan subjek untuk elemen positif? Jika Anda memberikan

tanggapan negatif terhadap poin tersebut, Anda dapat memilih skor "Sangat Setuju" (SS), "Setuju" (S), "Tidak Setuju" (TS), atau "Sangat Tidak Setuju" (STS).

Tabel 1.6
Penskoran Alternatif Jawaban

No	Kategori Jawaban Favorable	Skor	No	Kategori Jawaban Unfavorabel	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	4	1.	Sangat Setuju (SS)	1
2.	Setuju/sering (S)	3	2.	Setuju (S)	2
3.	Tidak Setuju (TS)	2	3.	Tidak Setuju (TS)	3
4.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4.	Sangat Tidak Setuju (STS)	4

1.9.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang diolah bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian dan menjawab rumusan masalah sehingga dapat menjelaskan situasi nyata di lapangan. Dalam hal ini, Sugiyono (2019:33) menyatakan bahwa tujuan Strategi investigasi informasi digunakan untuk menguji spekulasi atau menjawab definisi masalah. Akibatnya, pendapat di atas menunjukkan bahwa metode analisis data diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Untuk menyediakan uji statistik yang didukung oleh program aplikasi SPSS 26, langkah-langkah berikut harus diikuti:

1. Uji Validitas

Validitas, menurut Sugiyono (2017:121), didefinisikan sebagai tingkat ketepatan antara informasi yang tersedia pada subjek penelitian dan informasi yang dapat dijabarkan oleh analisis. Dalam perbedaannya, uji legitimasi digunakan untuk memutuskan legitimasi suatu penelitian. Angket

yang dianggap valid jika pertanyaannya memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang ingin diukur oleh peneliti. Penelitian ini menguji validitasnya dengan menggunakan program SPSS 26. H_0 diterima dan H_a ditolak jika taraf signifikansi $< 0,5$. Oleh karena itu, instrumen dikatakan valid jika skor indikator atau skor setiap pertanyaan instrumen berkorelasi positif dengan skor total variabel. Berikut adalah standar untuk menilai validitas uji.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017: 121), didefinisikan sebagai ketidaksamaan antara hasil penelitian yang dapat dipercaya antara data dari waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas membantu mengevaluasi konsistensi perangkat pengukuran terhadap pengulangan. Uji kualitas konstan dari pertanyaan dilakukan dengan menggunakan uji statistik alpha Cronbach. Posisi uji kualitas konstan adalah sebagai berikut: Jika koefisien alpha tabel lebih besar dari, maka kuesioner tersebut dapat diandalkan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Fokus utama pengumpulan data, yang merupakan tujuan utama penelitian (Sugiyono, 2018: 308). Riset ini, digunakan pengumpulan data angket non-tes. Menurut Noor (2018: 128), Skala likert dapat menjadi alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini mengukur sikap subjek. Peneliti membuat serangkaian pernyataan tentang suatu masalah atau subjek. Selanjutnya, peserta atau responden diminta untuk menentukan apakah mereka setuju atau

tidak dengan setiap item pendapat. Analisis menggunakan prosedur pengumpulan data seperti kuesioner dan dokumen:

1. Kuesioner

Survei dapat menjadi strategi pengumpulan data yang menyajikan serangkaian pertanyaan atau penjelasan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019:199). Angket riset ini mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator setiap variabel yang diuraikan dalam definisi operasional sebelumnya. Diberikan kepada responden dalam bentuk kertas cetak, yang merupakan hasil cetakan dari dokumen digital ke dalam kertas fisik melalui printer.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2019:329) menyatakan bahwa dokumentasi digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data siswa, yang terdiri dari daftar nama contoh pembelajaran. Temuan survei lebih dapat diandalkan jika didukung oleh teks, gambar, atau karya sebelumnya.

1.9.8 Teknik Analisis

Dalam pertanyaan kuantitatif, pendekatan terukur digunakan untuk menganalisis data, termasuk penghitungan korelasi, regresi, uji beda, analisis jalur, dan sebagainya (Sugiyono, 2019: 156). Persyaratan untuk analisis tes adalah sebagai berikut:

1. Uji Korelasi *Spearman Rank*

Uji korelasi *spearman rank* menentukan seberapa kuat hubungan yang ada antara variabel independen dan variabel dependen. Data ordinal dari berbagai sumber adalah jenis data korelasi *spearman rank* (Sugiyono, 2019: 156). Kedua variabel data tidak harus membentuk distribusi normal. Dalam implementasi program Indonesia Pintar di Kabupaten Wonosobo (Y), hubungan antara komunikasi (X1) dan sumber daya (X2) dianalisis melalui uji korelasi *spearman rank*. Rumus penelitian ini adalah:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum di^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

r_s : Nilai koefisien korelasi

di^2 : Selisih data

n : jumlah

Derajat hubungan dalam analisis korelasi *spearman rank* dijelaskan oleh Sugiyono (2019:157) sebagai berikut.

Tabel 1. 1

Tingkat Hubungan Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Keeratan Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2019:157).

Sebaliknya, hipotesis berikut dapat digunakan untuk memahami arah korelasi peringkat *Spearman*.

- a. Jika nilai $0 \leq r_s \leq 1$ ditambah tanda positif (+) maka nilai koefisien korelasi mempunyai arah hubungan berbanding lurus, sehingga semakin besar nilai variabel X maka semakin besar pula nilai variabel Y.
- b. Jika nilai $0 \leq r_s \leq 1$ bertanda negatif (-), maka nilai koefisien korelasi mempunyai arah hubungan yang berlawanan, yaitu semakin kecil nilai variabel X maka semakin besar nilai variabel Y, begitu pula sebaliknya.
- c. Jika nilai $r_s = 0$ maka tidak ada hubungan antara kedua variabel.

2. Uji Korelasi Berganda

Banyaknya pengujian hubungan mengukur ukuran atau kualitas hubungan antara semua faktor bebas dan bawahan pada saat yang sama. Koefisien hubungan dapat didefinisikan sebagai berikut, menurut Sugiyono (2019:257).

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{ryx_1^2 + r_{yx_2}^2 - 2ryx_1r_{xy_2}ryx_1ryx_2yx_2}{1 - r^2x_1x_2}}$$

Keterangan:

$R_{yx_1x_2}$ = Korelasi antara komunikasi dan sumber daya secara bersama-sama

dengan implementasi kebijakan PIP

rx_1 = Korelasi product moment antara komunikasi dengan implementasi kebijakan PIP

rx_2 = Korelasi product moment antara sumber daya secara bersama-sama dengan implementasi kebijakan PIP

$r^2_{x_1x_2}$ = Korelasi product moment antara komunikasi dengan sumber daya.